

Kerangka Acuan Kegiatan

PENGELOLAAN KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik merupakan bagian kegiatan yang terstruktur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan secara khusus menjadi tugas utama dari Seksi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan APBD 2019, maka kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (Fk Metra)
 - Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra
 - Final Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Jawa Tengah
 - Workshop FK Metra se Jawa Tengah
 - Pekan Informasi Nasional
2. Sub Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) / Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
3. Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Tengah
4. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Tengah

B. GAMBARAN UMUM

1. Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)

Forum Komunikasi Media Tradisional adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi komunitas media tradisional yang ada di seluruh Indonesia yakni di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan terbentuknya Forum Komunikasi Media Tradisional yang mewadahi seluruh komunitas Tradisional di Indonesia, maka diharapkan dapat membantu dan memperlancar penyebaran arus informasi publik kepada masyarakat sampai dengan ke pelosok pedesaan, melalui kegiatan pentas dan Festival Media Tradisional yang sesuai dengan daerahnya masing-masing.

2. Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) / Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Berbentuk sosialisasi kepada pengurus dan anggota LKM atau KIM agar dapat menjadi agen informasi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap media dan mengorganisasi pendayagunaan informasi untuk kepentingan masyarakat di pedesaan. Juga sebagai mitra dialog dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam merumuskan kebijakan publik.

3. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Tengah

Dengan workshop atau sosialisasi tentang pentingnya peran Humas dalam suatu lembaga atau instansi Pemerintah. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang Sekretaris SKPD Prov. Jateng dan Kominfo, serta Humas Kab/Kota se Jawa Tengah. Diharapkan melalui kegiatan ini petugas aparatur Humas Provinsi dan Kab/Kota bisa berkoordinasi dan mensinkronkan berbagai tugas kehumasan, yaitu meningkatkan citra positif lembaga, mempublikasikan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

4. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Merupakan bentuk diseminasi informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat tentang program-program pemerintah dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai melalui media tradisional dan pemutaran film. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengedukasi dan memberdayakan masyarakat terkait dengan pembangunan yang sedang berlangsung.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik melalui berbagai media baik seleksi FK Metra, sosialisasi/workshop LKM/KIM, Sinkronisasi Kehumasan dan Pelayanan Informasi melalui pemutaran film bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam membantu mendiseminasikan informasi kepada masyarakat.

D. VOLUME KEGIATAN

1. Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)

- Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra 6 kali
- Final Pertunjukan Rakyat FK Metra 1 kali
- Workshop FK Metra se Jawa Tengah 2 kali
- Menghadiri dan mengikuti Pekan Informasi Nasional 1 kali

2. Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) / Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2 kali
3. Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3 kali
4. Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah (PIKD) 6 kali

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)
 - Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra 6 kali
Kegiatan Seleksi Pertunjukan Rakyat Forum Komunikasi Media Tradisional dilaksanakan di 6 (enam) Kab/Kota yang ditunjuk menjadi tuan rumah melalui Workshop dengan FK Metra Kab/Kota.
 - Final Pertunjukan Rakyat FK Metra 1 kali
Final FK Metra dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan Jateng Fair
 - Workshop FK Metra dengan Kab/Kota se Jawa Tengah 2 kali
Dilaksanakan di bulan Februari dan September di Semarang
 - Menghadiri dan mengikuti Pekan Informasi Nasional atau Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi 1 kali
Kegiatan dari Kementerian Kominfo waktu dan pelaksanaan mengikuti agenda dari Kemenkominfo
5. Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) / Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2 kali
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) /Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan di Kab/Kota yang sudah terbentuk LKM/KIM namun masih belum berkembang. Dengan sosialisasi/workshop diharapkan LKM/KIM bisa maju dan berkembang.
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret dan Juli 2019
6. Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3 kali
Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan 3 kali dalam setahun, pada bulan Februari, Juni dan September bertempat di wil Jawa Tengah

7. Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah (PIKD) 6 kali

Kegiatan Pelayanan Informasi dan Kebijakan Daerah dilaksanakan 6 kali dalam setahun di Desa/Dusun yang masih terpencil di Kab/Kota.

Kegiatan PIKD dilaksanakan bulan Februari, April, Juni, Agustus, September, Nopember

2. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang muncul sebagai akibat kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik di bebaskan pada APBD Th. 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.023.709.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

3. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.